



BAGIAN ANGGARAN 023

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
AUDITED**



**BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA
(023.03.417808)**

Jalan Raya Pineleng Dua Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

BAGIAN ANGGARAN 023



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2024

BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA
(023.03.417808)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Jalan Raya Pineleng Dua Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPMP Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manado, 06 Mei 2025
Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara,

Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech (Man)
NIP. 197102042005011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akuntansi	13
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	22
B.3. Belanja Pegawai	23
B.4. Belanja Barang	24
B.5. Belanja Modal	25
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	26
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	26
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	26
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	26
C.4. Belanja Dibayar Dimuka	26
C.5. Persediaan	27
C.6. Tanah	27
C.7. Peralatan dan Mesin	28
C.8. Gedung dan Bangunan	28
C.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29
C.10. Aset Tetap Lainnya	29
C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	29
C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
C.13. Aset Tak Berwujud	30
C.14. Aset Tetap Lainnya	30
C.15. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	31
C.16. Utang kepada Pihak Ketiga	31
C.17. Uang Muka dari KPPN	31
C.18. Pendapatan Diterima Dimuka	31
C.19. Beban yang Masih Harus Dibayar	32
C.20. Ekuitas	32
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	33
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	33
D.2. Beban Pegawai	33
D.3. Beban Persediaan	34
D.4. Beban Barang dan Jasa	34
D.5. Beban Pemeliharaan	35

D.6. Beban Perjalanan Dinas	36
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	36
D.8. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	37
E.1. Ekuitas Awal	37
E.2. Surplus (Defisit) LO	37
E.3. Transaksi Antar Entitas	37
E.4. Ekuitas Akhir	38
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	38
F.1. Perubahan Kode Satker	38
F.2. Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN	38
F.3. Pejabat Perbendaharaan	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	40
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 Desember 2024	40
2. NERACA PER 31 Desember 2024	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023	21
Tabel 3. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023	21
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	22
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Belanja	23
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	23
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja Barang	24
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Modal	25
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
Tabel 10. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	26
Tabel 11. Rincian Persediaan	27
Tabel 12. Rincian Tanah	27
Tabel 13. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	29
Tabel 14. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	31
Tabel 16. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	33
Tabel 17. Rincian Beban Pegawai	33
Tabel 18. Rincian Beban Persediaan	34
Tabel 19. Rincian Beban Barang dan Jasa	35
Tabel 20. Rincian Beban Pemeliharaan	35
Tabel 21. Rincian Beban Perjalanan Dinas	36
Tabel 22. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	36
Tabel 23. Rincian Kegiatan Non Operasional	37
Tabel 24. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	37



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Raya Pineleng Dua Minahasa 95661, Kotak Pos 1329
Telepon 0431-822464, 825492 Laman lpmpsulawesiutara.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, 06 Mei 2025
Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara,

Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech (Man)
NIP. 197102042005011002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024..

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp130.724.683,00 atau mencapai 217.87% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp60.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar 29.538.962.456,00 atau mencapai 95,33% dari alokasi anggaran sebesar Rp30.986.145.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp65.105.808.582,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp502.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp64.947.305.128,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp618.081.941,00 dan Rp65.002.106.024,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp121.480.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp31.876.178.996,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (31.754.698.996,00). Kegiatan Non Operasional terdapat surplus sebesar Rp9.244.683,00 sedangkan Pos-Pos Luar Biasa surplus/defisit sebesar Rp(31.745.454.313,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(31.745.454.313,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp67.376.484.292,00 Defisit-LO sebesar (31.745.454.313,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp29.408.237.773,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp65.002.106.024,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

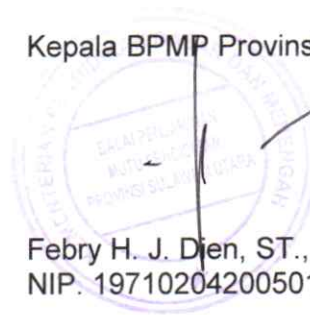
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			2023
		Anggaran	Realisasi	% Real. Anggaran	Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	60.000.000	130.724.683	217,87	329.804.361
Jumlah Pendapatan		60.000.000	130.724.683	217,87	329.804.361
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	9.918.134.000	9.651.891.817	97,32	39.864.537
Belanja Barang	B.4	19.582.611.000	18.596.705.639	94,97	264.629.717
Belanja Modal	B.5	1.485.400.000	1.290.365.000	86,87	400.000
Belanja Bantuan Sosial		0	0		0
Jumlah Belanja		30.986.145.000	29.538.962.456	95,33	304.894.254

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara,



Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech (Man)
 NIP. 197102042005011002

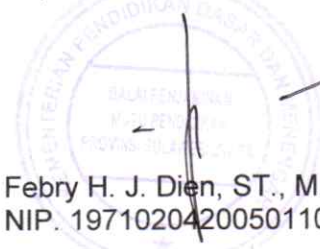
BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

NERACA

PER 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	2023
Aset			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Persediaan	C.2	502.000	128.632.000
Jumlah Aset Lancar		502.000	128.632.000
Aset Tetap			
Tanah	C.3	16.974.139.000	16.974.139.000
Peralatan dan Mesin	C.4	9.094.483.260	13.572.932.535
Gedung dan Bangunan	C.5	61.118.521.011	59.799.847.261
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	786.862.000	786.862.000
Aset Tetap Lainnya	C.7	34.912.649	34.912.649
Konstruksi Dalam Pekerjaan	C.8	0	225.308.750
Akumulasi Penyusutan	C.9	(23.061.612.792)	(24.146.149.903)
Jumlah Aset Tetap		64.947.305.128	67.247.852.292
Aset Lainnya			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.10	57.325.400	0
Aset Lain-Lain	C.11	4.671.549.275	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.12	(4.574.756.121)	0
Jumlah Aset Lainnya		154.118.554	0
Jumlah Aset		65.105.808.582	67.376.484.292
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	103.702.558	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.14	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.15	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		103.702.558	0
Jumlah Kewajiban		103.702.558	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.16	65.002.106.024	67.376.484.292
Jumlah Ekuitas		65.002.106.024	67.376.484.292
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		65.105.808.582	67.376.484.292

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara,



Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech (Man)
NIP. 197102042005011002

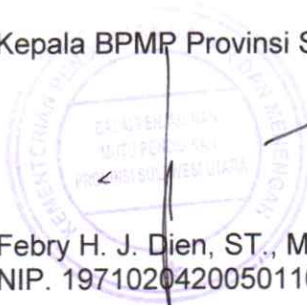
BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	121.480.000	171.275.000
Jumlah Pendapatan Operasional		121.480.000	171.275.000
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D.2	9.648.008.917	9.365.385.463
Beban Persediaan	D.3	495.815.820	402.611.985
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.968.883.366	7.315.310.436
Beban Pemeliharaan	D.5	3.130.488.371	2.973.211.769
Beban Perjalanan Dinas	D.6	8.047.525.240	8.793.600.093
Beban Barang Untuk Diserahkan Masyarakat		128.500.000	0
Beban Bantuan Sosial		0	0
Beban Penyusutan	D.7	3.456.957.282	4.097.390.021
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0	0
Jumlah Beban Operasional		31.876.178.996	32.947.509.767
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(31.754.698.996)	(32.776.234.767)
Kegiatan Non Operasional			
Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	132.775.500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	48.223.684
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	9.244.683	25.753.861
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	0	0
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.244.683	110.238.677,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		9.244.683	110.305.677
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		(31.745.454.313)	(32.665.929.090)
Surplus/Defisit LO		(31.745.454.313)	(32.665.929.090)

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara,


 Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech (Man)
 NIP. 197102042005011002

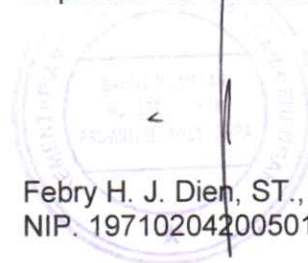
BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E.1	67.376.484.292	71.425.587.435
Surplus/Defisit LO	E.2	(31.745.454.313)	(32.665.929.090)
Koreksi Menambah/Mengurangi Ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(37.161.728)	0,
Koreksi Lain-Lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.3	29.408.237.773	28.616.825.947
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		(2.374.378.268)	(4.049.103.143)
EKUITAS AKHIR		65.002.106.024	67.376.484.292

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara,



Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech (Man)
NIP. 197102042005011002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 -2024;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan 110/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;

31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya;
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan;
34. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
35. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
36. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 202/P/2023 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
39. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2022 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
40. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
41. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Petunjuk Teknis Akutansi 25: Persediaan dalam proses, Persediaan yang tidak dikuasai, dan KDP/ATB dalam Pengerjaan yang dihentikan;
42. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (*Audited*);
43. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0274/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 07 Januari 2025 hal Langkah-langkah dan Kebijakan Penyusunan laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2024;

44. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 029/C1/KU.03.02/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*);

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan peraturan Permendikbudristek No 11 Tahun 2023 Tentang Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Tugas dan Fungsi

BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

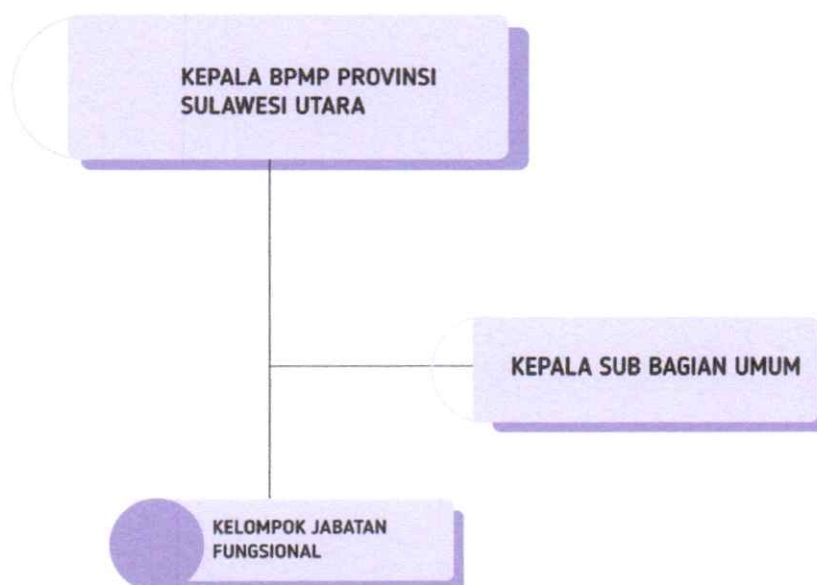
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana amanat peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, BPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023, susunan organisasi BPMP terdiri atas Kepala, Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI



Tujuan Dan Indikator Kinerja Tujuan

Visi BPMP Provinsi Sulawesi Utara:

"Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global."

Misi BPMP Provinsi Sulawesi Utara:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.

Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Sesuai dengan Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut:

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1. Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
		1.2. Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara
		2.1. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara

Target Perjanjian Kinerja

	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2020	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	SK					
1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	IKK	-	-	0.98	1,96%	3,92%
1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	IKK	-	-	25	30	35
2	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	SK					
2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	IKK	BB	BB	A	A	A
2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	IKK	81	82	83	84	85

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

A.4. Basis Akuntansi

BPMP Provinsi Sulawesi Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.5. Aset

A.6.5.1 Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga perolehan terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.6.5.2 Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

A.6.5.3 Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

A.6.5.4 Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang dan Cadangan pemerintah. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain serta Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPMP Provinsi Sulawesi Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal tetapi tidak merubah nilai pagu pada masing masing jenis belanjanya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	60.000.000,	60.000.000,
Jumlah Pendapatan	60.000.000,	60.000.000,
Belanja		
Belanja Pegawai	10.165.468.000,00,	9.918.134.000,
Belanja Barang	18.819.560.000,	19.582.611.000,
Belanja Modal	1.000.000.000,	1.485.400.000,
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	29.985.028.000,	30.986.145.000,

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 130.724.683,00 atau mencapai 217,87% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00. Pendapatan BPMP Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	60.000.000	130.724.683	217,87%
Jumlah	60.000.000	130.724.683	217,87%

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan yang berakhir pada 31 Desember 2023, Realisasi Pendapatan yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp130.724.683,00 mengalami penurunan sebesar Rp(199.079.678,00) atau -60,36% dibandingkan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya penggunaan/sewa gedung BPMP Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.
2. Berkurangnya pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
3. Tidak ada pendapatan dari Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Rincian perbandingan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	130.724.683	329.804.361	(60,36)%
Jumlah	130.724.683	329.804.361	(60,36)%

B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp130.724.683,00 dan 329.804.361,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar (60,36)% dari TA 2023. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	121.480.000,00	304.050.500,00	(60,05)%
Pendapatan Lain-Lain	9.244.683,00	25.753.861,00	(64,10)%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	-	-	-
Jumlah	130.724.683,00	329.804.361,00	(60,36)%

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan Barang Milik Negara pada periode 30 September tahun 2024 sebesar Rp121.480.000,00 merupakan pendapatan dari sewa asrama, ruang kelas, dan ruang serbaguna untuk kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan BPMP Provinsi Sulawesi Utara, maupun dari pihak swasta. Tarif yang ditetapkan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh KPKNL Manado melalui Surat Nomor S-36/MK.6/KNL.1601/2023 tanggal 18 April 2023, dan kemudian diturunkan menjadi SK Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara Nomor 330/C7.27/KU/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Pendapatan Lain-lain pada periode 30 September Tahun 2024 sebesar Rp9.244.683,00 merupakan pendapatan dari pengembalian belanja pegawai tahun anggaran 2023 berupa pengembalian belanja tunjangan kinerja bulan Desember 2023 dan uang makan bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Desember 2023 tanpa potongan. Pada bulan

Januari 2024 dilakukan perhitungan atas potongan tunjangan kinerja dan uang makan sehingga diperoleh kelebihan pembayaran yang kemudian disetorkan kembali ke kas negara.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.080.709.074,00 atau 65% dari anggaran belanja sebesar Rp30.986.145.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada Triwulan III TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	31 Desember 2024		% Real. thdp Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	9.918.134.000,	9.651.891.817,	97,3%
Belanja Barang	19.582.611.000,	18.596.705.639,	95%
Belanja Modal	1.485.400.000,	1.290.365.000,	86,9%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Realisasi Belanja Kotor	30.986.145.000,	29.538.962.456,	95,33%
Pengembalian Belanja		9.244.683	
Realisasi Belanja Netto	30.986.145.000,	29.548.207.139,00	95,36%

Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 639.183.710,00 atau 2,21% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan realisasi belanja modal.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Belanja Pegawai	7.284.742.709,	6.969.106.169,	4,53%
Belanja Barang	12.718.621.565,	9.324.566.835,	36,40%
Belanja Modal	77.344.800,	49.600.000,	55,94%
Jumlah Realisasi Belanja	20.080.709.074,	16.343.273.004,	22,87%

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.634.803.997,00 dan Rp9.365.385.463,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp269.418.534,00 atau 2,88% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2. Bertambahnya Pegawai berupa PPPK di BPMP Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.869.231.000	3.816.355.700	1,39%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.731	55.568	(5,11%)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	283.060.200	263.425.820	7,45%
Belanja Tunj. Anak PNS	73.467.852	68.566.710	7,15%
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0,00%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	218.860.000	189.240.000	15,65%
Belanja Tunj. PPh PNS	43.941.671	14.444.464	204,21%
Belanja Tunj. Beras PNS	186.481.500	194.882.220	(4,31%)
Belanja Uang Makan PNS	383.103.000	438.794.000	(12,69%)
Belanja Tunjangan Umum PNS	137.760.000	154.250.000	(10,69%)
Belanja Uang Lembur	6.427.000	50.555.000	(87,29%)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4.262.519.268	4.149.615.981	2,72%
Belanja Gaji Pokok PPPK	57.664.800	-	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	759	-	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.281.440	-	

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	256.288	-	
Belanja Uang Makan PPPK	5.705.000		
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	79.791.488		
Jumlah Belanja kotor	9.634.803.997,00	9.365.385.463,00	2,88%
Pengembalian Belanja Pegawai	5.394.683	7.285.861	(25,96%)
Jumlah Belanja	9.640.198.680,00	9.372.671.324,00	2,85%

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.221.157.954	5.165.214.482	1,08%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	64.908.287	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	6.427.000	50.555.000	(87,29)%
Belanja Tunj. Khusus & Transito	4.342.310.756	4.149.615.981	4,64%
Jumlah Realisasi Belanja	9.634.803.997	9.365.385.463,00	2,85%
Pengembalian Belanja Pegawai	5.394.683	7.285.861	(25,96%)
Jumlah Realisasi Belanja	9.640.198.680	9.372.671.324,00	2,85%

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 18.596.705.639,00 dan Rp 19.484.793.283,00. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 888.087.644,00 atau 4,56% dibandingkan realisasi belanja barang pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kontrak jasa konsultan tidak 12 bulan.
2. Sebagian kegiatan dilaksanakan secara hybrid

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Belanja Barang Operasional	1.988.008.690	1.888.048.485	5,29%
Belanja Barang Non Operasional	3.007.546.479	3.193.301.767	(5,82%)
Belanja Barang Persediaan	518.570.220	468.375.385	10,72%
Belanja Jasa	1.926.951.039	2.233.960.184	(13,74%)
Belanja Pemeliharaan	3.108.103.971	2.907.507.369	6,90%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.047.525.240	8.793.600.093	(8,48%)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	-
Jumlah Realisasi Belanja	18.596.705.639	19.484.793.283	(4,56%)

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.290.365.000,00 dan Rp49.690.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.240.765.000,00 atau 2502% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain realisasi belanja modal untuk renovasi gedung dan bangunan.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.000.000	49.690.000	296%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.093.365.000	0	
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Realisasi Belanja	1.290.365.000	49.600.000,	2502%

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp49.690.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp49.690.000,00 atau -100% bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Anggaran yang disediakan untuk pembelian peralatan podcast.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	31 Desember 2024	30 Juni 2023	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.000.000	49.690.000	296%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	
Jumlah Realisasi Belanja	197.000.000	49.690.000	296%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2024	30 Juni 2023
Kas Tunai	0,	0
PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Kemdikbud No Acc 8100124178081000	0	0
Jumlah	0	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.4. Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.5. Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.431.000, dan Rp314.680.885,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	502.000	128.632.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Bahan untuk Proses Produksi	0	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
Persediaan Bahan Lainnya	0	0
Jumlah	518.570.220	314.680.885,

C.6. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPMP Provinsi Sulawesi Utara per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp16.974.139.000,00 dan Rp16.974.139.000,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	16.974.139.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	16.974.139.000

Rincian saldo Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	40120 m2	Jl. Raya Pineleng Dua, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara	16.974.139.000
Jumlah			16.974.139.000

C.7. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp9.416.956.155,00 dan Rp13.944.901.560,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	13.944.901.560
Mutasi Tambah:	
Pembelian	197.000.000
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	(4.724.945.405)
Saldo per 31 Desember 2024	9.416.956.155
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	3.332.101.759
Nilai Buku per 31 Desember 2024	666.728.590

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa peralatan podcast berupa

1. Mikrofon Podcast Wireless
2. Mikrofon Podcast
3. Mikrofon Clip On
4. Pop Filter
5. Headphone
6. Digital Audio Workstation
7. Gymbal Camera
8. Perekam XLR
9. Tripod Kamera Fold
10. Ring Light
11. Audio Interface
12. Boom untuk Mikrofon
13. Tripod Kamera

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa alat kantor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp61.118.521.011,00 dan Rp59.799.847.261,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	59.799.847.261
Mutasi Tambah	1.396.018.550
Mutasi Kurang	77.344.800
Saldo per 31 Desember 2024	61.118.521.011
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(14.236.243.724)

Nilai Buku per 31 Desember 2024

46.882.277.287

C.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp786.862.000,00 dan Rp786.862.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	786.862.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	786.862.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(382.687.398)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	404.174.602,000

C.10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp84.137.649,00 dan Rp84.137.649,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	34.912.649
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	84.137.649
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(19.985.649)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	19.985.649,

C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp225.308.750,00 yang merupakan pembangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian saldo KDP pertanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp26.866.425.920,00 dan Rp22.569.676.856,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa

manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	9.094.483.260,00	(8.427.754.670)	666.728.590
Gedung dan Bangunan	61.118.521.011	(14.236.243.724)	46.882.277.287
Jalan, Irigasi dan Jaringan	786.862.000	(382.687.398)	404.174.602
Aset Tetap Lainnya	34.912.649,00	(14.927.000)	19.985.649
Jumlah	71.034.778.920	(23.061.612.792)	47.973.166.128

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp48.800.000,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

C.14. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp453.537.500,00 dan Rp323.853.500,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	323.853.500
Mutasi Tambah	129.684.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	129.684.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	453.537.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(453.537.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.15. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp477.937.500,00 dan Rp443.303.500,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	24.400.000
Aset Lain-Lain	453.537.500	(453.537.500)	0
Jumlah	502.337.500	(476.937.500)	24.400.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.16. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp57.325.400,00 Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga yang dimaksud ialah pembayaran revitalisasi asrama klabat transaksi yang menggunakan RPATA dimana dibayarkan pada TA 2025.

C.17. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.18. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C.19. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

C.20. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp68.920.852.925, 65.002.106.024,,00 dan Rp67.376.484.292,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp130.724.683,00 dan Rp329.804.361,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 16. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Uraian	30-Sep-24	30 Juni 2023	Naik/Turun
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	121.480.000,00	304.050.500,00	(60,05)%
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Keuangan	0	0	(
Pendapatan Denda	0	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.394.683,00	7.285.861,00	(25,96)%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.850.000,00	18.468.000	(79,15)%
Jumlah	130.724.683,00	329.804.361,00	(60,36)%

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.634.803.997,00 dan Rp9.365.385.463,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,88% dibandingkan dengan tahun 2023 .

Tabel 17. Rincian Beban Pegawai

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.869.231.000	3.816.355.700	1,39%
Beban Pembulatan Gaji PNS	52.731	55.568	-5,11%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	283.060.200	263.425.820	7,45%
Beban Tunj. Anak PNS	73.467.852	68.566.710	7,15%
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0,00%
Beban Tunj. Fungsional PNS	218.860.000	189.240.000	15,65%
Beban Tunj. PPh PNS	43.941.671	14.444.464	204,21%
Beban Tunj. Beras PNS	186.481.500	194.882.220	-4,31%
Beban Uang Makan PNS	383.103.000	438.794.000	-12,69%
Beban Tunjangan Umum PNS	137.760.000	154.250.000	-10,69%
Beban Uang Lembur	6.427.000	50.555.000	-87,29%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4.262.519.268	4.149.615.981	2,72%
Beban Gaji Pokok PPPK	57.664.800	-	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	759	-	

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.281.440	-	
Beban Tunjangan Beras PPPK	256.288	-	
Beban Uang Makan PPPK	5.705.000		
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	79.791.488		
Jumlah Belanja kotor	9.634.803.997,00	9.365.385.463,00	2,88%
Pengembalian Belanja Pegawai	5.394.683	7.285.861	-25,96%
Jumlah Belanja	9.640.198.680,00	9.372.671.324,00	2,85%

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.221.157.954	5.165.214.482	1,08%
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	64.908.287	0	-
Beban Honorarium	0	0	-
Beban Lembur	6.427.000	50.555.000	(87,29)%
Beban Tunj. Khusus & Transito	4.342.310.756	4.149.615.981	4,64%
Jumlah	9.634.803.997	9.365.385.463,00	2,88%

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp646.700.220,00 dan Rp596.816.385,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun
B. Persediaan Konsumsi	495.815.820,00	402.611.985,00	23,15%
B. Persediaan - dijual/diserahkan kpd Masyarakat	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00%
B. Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	22.384.400,00	65.704.400,00	(65,93%)
B. Persediaan Bahan Lainnya	0	0	-
Jumlah	646.700.220,00	596.816.385,00	8,36%

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.234.868.816,00 dan Rp6.321.067.844,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang

timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,36 % dibandingkan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya honor output kegiatan, Honor Operasional Satuan Kerja dan Pengiriman Surat Dinas Pos Surat. Rincian Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.601.157.464,00	1.407.552.427,00	13,75%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	344.100,00	22.658.460,00	(98,48%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	122.056.000,00	199.460.000,00	(38,81%)
Beban Barang Operasional Lainnya	264.451.126,00	258.377.598,00	2,35%
Beban Bahan	2.954.646.479,00	3.081.828.872,00	(4,13%)
Beban Honor Output Kegiatan	52.900.000,00	88.100.000,00	(39,95%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	23.372.895,00	(100,00%)
Beban Langganan Listrik	1.084.962.657,00	1.091.532.580,00	(0,60%)
Beban Langganan Telepon	154.350.990,00	148.185.012,00	4,16%
Jumlah	6.234.868.816	6.321.067.844	(1,36%)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.130.488.371,00 dan Rp2.973.211.769,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,29% dibandingkan tahun 2023 disebabkan pelaksanaan pemeliharaan telah dilaksanakan sejak awal tahun. Rincian beban pemeliharaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.237.388.000,00	1.982.056.600,00	12,88%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	870.715.971,00	925.450.769,00	(5,91%)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22.384.400,00	65.704.400,00	(65,93%)
Jumlah	3.130.488.371,00	2.973.211.769,00	5,29%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.047.525.240,00 dan Rp8.793.600.093,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,48% dibandingkan tahun 2023 disebabkan banyak kegiatan yang dilaksanakan secara luring dengan mengundang kab/kota ke BPMP Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	3.924.621.655,00	4.589.329.715,00	(14,48%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	221.009.300,00	12.890.000,00	1614,58%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.901.894.285,00	4.191.380.378,00	(6,91%)
Jumlah	8.047.525.240,00	8.793.600.093,00	(8,48%)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.456.957.282,00 dan Rp4.097.390.021,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.192.840.391,00	1.894.323.206,00	(37,03%)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.192.952.906,00	2.175.616.801,00	0,80%
Beban Penyusutan Irigasi	766.614,00	766.614,00	0,00%
Beban Penyusutan Jaringan	20.583.400,00	20.583.400,00	0,00%
Beban Amortisasi Software	0	6.100.000,00	(100,00%)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	49.813.971,00	0	-
Jumlah Penyusutan	3.456.957.282,00	4.097.390.021,00	(15,63%)
Jumlah	1.857.638.751,00	2.214.780.349,00	(16,13%)

D.8. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.394.683	7.285.861	-25,96%
Jumlah	5.394.683	7.285.861	-25,96%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp67.376.484.292,00 dan Rp71.425.587.435,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp31.745.454.313,00 dan Rp(32.665.929.090,00). Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29.408.237.773,00 dan Rp28.616.825.947,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 24. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	29.538.962.456
Diterima dari Entitas Lain	(130.724.683)
Jumlah	29.408.237.773,00

E.3.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar 29.538.962.456,00 sedangkan DKEL sebesar - Rp130.724.683,00.

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.002.106.024,00 dan Rp 67.376.484.292,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Perubahan Kode Satker

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, maka BPMP Provinsi Sulawesi Utara mengalami perubahan Kode Satker semula 417808 menjadi 693224.

F.2. Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN

Akun belanja 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan seharusnya 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan;

Kesalahan pencatatan 135111 aset tetap renovasi seharusnya Konstruksi Dalam Pengerjaan sehingga melakukan koreksi:

- 305 Koreksi Pencatatan
- 204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Gedung dan Bangunan

Aset Asrama Permanen NUP 6.

F.3. Lain-lain

Pada laporan keuangan BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 *audited* tidak terdapat koreksi baik dari BPK maupun pengajuan internal dari satuan kerja.

Manado, 06 Mei 2025

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara



Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech (Man)
NIP. 197102042005011002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 03
SATUAN KERJA : BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA 417808

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	60,000,000	130,724,683	70,724,683	217.87	127,500,000	329,804,361	202,304,361	258.57
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	60,000,000	130,724,683	70,724,683	217.87	127,500,000	329,804,361	202,304,361	258.57
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	60,000,000	130,724,683	70,724,683	217.87	127,500,000	329,804,361	202,304,361	258.57
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat	30,986,145,000	29,538,962,456	(1,447,182,544)	95.33	29,204,673,000	28,899,778,746	(304,894,254)	98.96
1. Belanja Pegawai	9,918,134,000	9,651,891,817	(266,242,183)	97.32	9,405,250,000	9,365,385,463	(39,864,537)	99.58
2. Belanja Barang	19,582,611,000	18,596,705,639	(985,905,361)	94.97	19,749,423,000	19,484,793,283	(264,629,717)	98.66
3. Belanja Modal	1,485,400,000	1,290,365,000	(195,035,000)	86.87	50,000,000	49,600,000	(400,000)	99.2
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang								
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 03
SATUAN KERJA : BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA 417808

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	
			4	5			9	10
1	2				7	8		
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	30,986,145,000	29,538,962,456	(1,447,182,544)	95.33	29,204,673,000	28,899,778,746	(304,894,254)	98.96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Manado, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala
Febry H. J. Dien ST, M.Inf.Tech.(MAN)
Pembina IVA 197102042005011002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3,882,900	0	3,882,900	0.00
Persediaan	502,000	128,632,000	(128,130,000)	(99.61)
JUMLAH ASET LANCAR	4,384,900	128,632,000	(124,247,100)	(96.59)
ASET TETAP				
Tanah	16,974,139,000	16,974,139,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	9,094,483,260	13,572,932,535	(4,478,449,275)	(33.00)
Gedung dan Bangunan	61,118,521,011	59,799,847,261	1,318,673,750	2.21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	786,862,000	786,862,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	34,912,649	34,912,649	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	225,308,750	(225,308,750)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(23,061,612,792)	(24,146,149,903)	1,084,537,111	(4.49)
JUMLAH ASET TETAP	64,947,305,128	67,247,852,292	(2,300,547,164)	(3.42)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	57,325,400	0	57,325,400	0.00
Aset Lain-lain	4,671,549,275	0	4,671,549,275	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,574,756,121)	0	(4,574,756,121)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	154,118,554	0	154,118,554	
JUMLAH ASET	65,105,808,582	67,376,484,292	(2,270,675,710)	(3.37)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	103,702,558	0	103,702,558	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103,702,558	0	103,702,558	
JUMLAH KEWAJIBAN	103,702,558	0	103,702,558	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	65,002,106,024	67,376,484,292	(2,374,378,268)	(3.52)
JUMLAH EKUITAS	65,002,106,024	67,376,484,292	(2,374,378,268)	(3.52)
JUMLAH EKUITAS	65,002,106,024	67,376,484,292	(2,374,378,268)	(3.52)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	65,105,808,582	67,376,484,292	(2,270,675,710)	(3.37)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Manado, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
Kepala

Febry H. J. Dien ST, M.Inf.Tech.(MAN)
Pembina IVA 197102042005011002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,456,957,282	4,097,390,021	(640,432,739)	(15.63)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	31,876,178,996	32,947,509,767	(1,071,330,771)	(3.252)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(31,754,698,996)	(32,776,234,767)	1,021,535,771	(3.117)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	84,551,816	(84,551,816)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	132,775,500	(132,775,500)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	48,223,684	(48,223,684)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,244,683	25,753,861	(16,509,178)	(64.104)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,244,683	25,753,861	(16,509,178)	(64.104)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9,244,683	110,305,677	(101,060,994)	(91.619)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(31,745,454,313)	(32,665,929,090)	920,474,777	(2.818)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(31,745,454,313)	(32,665,929,090)	920,474,777	(2.818)

Keterangan :

FINAL

Manado, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala

Febry H. J. Dien ST, M.Inf.Tech.(MAN)
Pembina IVA 197102042005011002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM
Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	67,376,484,292	71,425,587,435	(4,049,103,143)	(5.67)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(31,745,454,313)	(32,665,929,090)	920,474,777	(2.82)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(37,161,728)	0	(37,161,728)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(37,161,728)	0	(37,161,728)	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	29,408,237,773	28,616,825,947	791,411,826	2.77
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,374,378,268)	(4,049,103,143)	1,674,724,875	(41.36)
EKUITAS AKHIR	65,002,106,024	67,376,484,292	(2,374,378,268)	(3.52)

Keterangan :

FINAL

Manado, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA

Kepala

Febry H. J. Dien S¹, M.Inf.Tech.(MAN)
Pembina IVA 197102042005011002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	121,480,000	171,275,000	(49,795,000)	(29.073)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	121,480,000	171,275,000	(49,795,000)	(29.073)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	121,480,000	171,275,000	(49,795,000)	(29.073)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9,648,008,917	9,365,385,463	282,623,454	3.018
Beban Persediaan	495,815,820	402,611,985	93,203,835	23.15
Beban Barang dan Jasa	6,968,883,366	7,315,310,436	(346,427,070)	(4.736)
Beban Pemeliharaan	3,130,488,371	2,973,211,769	157,276,602	5.29
Beban Perjalanan Dinas	8,047,525,240	8,793,600,093	(746,074,853)	(8.484)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	128,500,000	0	128,500,000	

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	3,882,900	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	502,000	0
0.0	131111	Tanah	16,974,139,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,094,483,260	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	61,118,521,011	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	140,612,000	0
0.0	134112	Irigasi	28,748,000	0
0.0	134113	Jaringan	617,502,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	34,912,649	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,427,754,670
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	14,236,243,724
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	140,612,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,366,298
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	236,709,100
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	14,927,000
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	57,325,400	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,671,549,275	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	4,574,756,121
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	46,377,158
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	57,325,400
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	29,538,962,456
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	130,724,683	0
0.0	391111	Ekuitas	0	67,376,484,292
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230,261,728	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	193,100,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	121,480,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,394,683
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,850,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,869,231,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	52,731	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	283,060,200	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	73,467,852	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	218,860,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	43,941,671	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	186,481,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	383,103,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 12:37 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	137,760,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	57,664,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	759	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,281,440	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	256,288	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,705,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,882,920	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,322,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	6,427,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,262,519,268	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	79,791,488	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,601,157,464	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	344,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	122,056,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	264,451,126	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,954,646,479	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	52,900,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,084,962,657	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	154,350,990	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	412,964,550	0
3.0	522141	Beban Sewa	151,950,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	169,100,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,237,388,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	870,715,971	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,924,621,655	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	221,009,300	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,901,894,285	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,192,840,391	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,192,952,906	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	766,614	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	20,583,400	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	49,813,971	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	495,815,820	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22,384,400	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	128,500,000	0
JUMLAH			124,979,342,902	124,979,342,902

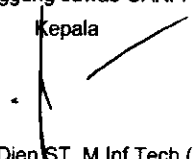
Keterangan :

FINAL

Manado, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala



Febry H. J. Dien ST, M.Inf.Tech.(MAN)

Pembina IVA 197102042005011002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 12:38 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	29,538,962,456
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	130,724,683	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	121,480,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,394,683
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,850,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,869,231,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52,817	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	283,060,200	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	73,467,852	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	218,860,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	43,941,671	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	186,481,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	383,103,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	137,760,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	57,664,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	759	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,281,440	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	256,288	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,705,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,882,920	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,322,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	6,427,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,266,370,841	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	79,822,815	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,601,157,464	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	344,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	122,056,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	264,451,126	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,954,646,479	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	52,900,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	518,570,220	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,040,799,067	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	152,137,422	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	412,964,550	0
3.0	522141	Belanja Sewa	151,950,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	169,100,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,237,388,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (417808) BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:38 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	870,715,971	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,924,621,655	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	221,009,300	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,901,894,285	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197,000,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,093,365,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	86
JUMLAH			29,669,687,225	29,669,687,225

Keterangan :
FINAL

Manado, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala

Febry H. J. Dien ST, M.Inf.Tech.(MAN)
197102042005011002

TUTUP BUKU MONITORING

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2024-14

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON 1 : 03
WILAYAH/PROPINSI : 1700
SATUAN KERJA : 417808
JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN
BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA
Kantor Daerah

Tanggal : 05-05-2025
Halaman : 1

KODE PERIODE	NAMA MODUL	TGL PENUTUPAN
ADJ II 2024	Aset Tetap	05-05-2025
ADJ II 2024	Persediaan	05-05-2025
ADJ II 2024	Pembayaran	05-05-2025
ADJ II 2024	GL dan Pelaporan	05-05-2025
ADJ II 2024	INTERKONEKSI	05-05-2025
ADJ II 2024	Komitmen	05-05-2025
ADJ II 2024	Anggaran	05-05-2025
ADJ II 2024	Administrasi	05-05-2025
ADJ II 2024	Bendahara	05-05-2025
ADJ II 2024	Piutang	05-05-2025



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 417808
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	30,986,145,000	30,986,145,000	0
2	Belanja	29,538,962,542	29,538,962,542	0
3	Pengembalian Belanja	-86	-86	0
4	Estimasi Pendapatan	60,000,000	60,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	130,724,683	130,724,683	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 31-JAN-25

